

# Catatan Kritis RAPBD 2010

Oleh FX Sugiyanto

**SEJENAK** marilah kita tinggalkan kisruh KPK vs Polri dan Kejugung untuk melihat isu daerah yang tidak kalah penting. Isu-isu ekonomi belakangan memang sedang "kalah rating" dibanding isu KPK vs Polri dan Kejugung yang sangat menguras energi bangsa ini. Seharusnya tidak perlu terjadi kalau negara ini dikelola dengan jujur dan adil.



Isu RAPBD Jateng 2010 dan Bali Desa Mbangun Desa mungkin kalah hangat. Dalam perspektif Ekonomi Publik, Anggaran Pemerintah (baca APBD) hanyalah sebagai instrumen manajemen. Artinya, APBD hanya ada dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam visi dan misi organisasi pemerintah. Akan halnya dengan visi dan misi Gubernur Jateng 2008-2013, kita sudah sepakat dan saya juga sudah sering katakan; sangat strategis dan *smart*. Tetapi apakah visi-misi tersebut akan mencapai tujuan yang diharapkan, tentu hal ini harus dilihat pada berbagai indikator dan target tahunan yang akan dicapai dan tertuang dalam APBD. Apakah alokasi anggaran tersebut mampu memberi gambaran ke arah pencapaian visi atau tidak.

Satu tahun sudah visi Bali Desa Mbangun Desa (BDMD) digelorakan. Karena itu sudah saatnya pula kita melakukan evaluasi dan tentu bersama mendorong Gubernur Jateng merealisasikan visi. Ketika saya berkesempatan untuk menyampaikan pandangan pada forum "Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Bibit Waluyo" beberapa bulan lalu, secara terbuka saya katakan bahwa sangat tidak mudah mengevaluasi kinerja Gubernur yang baru satu tahun; apalagi dari separo yang satu tahun tersebut adalah anggaran tahun sebelumnya yang disusun oleh gubernur yang digantikan. Walaupun demikian, masukan penting telah diberikan yakni agar Gubernur melakukan penajaman program mulai anggaran 2010.

Secara substansial RAPBD 2010 tidak banyak mengalami perubahan dari anggaran tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,5% - 5,5%. Sementara inflasi hanya dikatakan di bawah 2 digit. Ini sangat kabur, sementara dua digit itu dari 0,00% hingga 9,99%. Mestinya, karena kewenangan pengendalian inflasi ada pada pemerintah pusat (baca BI) ikuti saja target nasional sekitar 5%. Ketidakjelasan target ini tentu menimbulkan keraguan, sebab logikanya setiap perubahan asumsi akan memengaruhi target pencapaian. Implikasinya berpengaruh terhadap alokasi anggaran. Walaupun

demikian, berbeda dengan penyusunan RAPBD sebelumnya, kali ini pemerintah sudah berani menetapkan target penurunan tingkat pengangguran menjadi 6,5% - 7,0% dari tingkat pengangguran saat ini sebesar 7,28%. Demikian juga dalam hal penurunan tingkat kemiskinan, pemerintah menargetkan penurunan sebesar 4% - 5% dari kondisi saat ini sebesar 17,72%. Atau menjadi sekitar 16,83% pada akhir tahun 2010. Suatu penurunan yang sangat kecil.

Pemerintah juga menargetkan investasi sebesar Rp 70 triliun yang 30%-nya besumber dari pemerintah atau sebesar Rp 23,33 triliun. Akan lebih baik jika pemerintah juga mampu memberi gambaran strategis dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-nya dengan menunjukkan berapa investasi untuk Usaha Menengah dan Besar

dan berapa untuk UKM serta kebijakan apa yang secara fokus akan dilakukan untuk mengakselerasi investasi. Juga, dari Rp 23,33 triliun ada berapa yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, kabu-

paten dan kota. Tentu akan lebih baik lagi jika pemerintah mampu mem-

perinci lebih jauh lagi pada target-target sektoral yang akan dicapai. Walaupun demikian

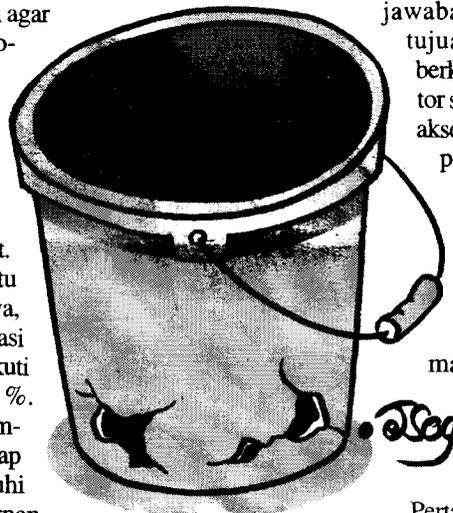
hal ini harus kita hargai karena akhir tahun 2010 kita dapat melakukan evaluasi dengan indikator-indikator yang terukur. Walaupun demikian, masih tersisa pertanyaan besar, apakah alokasi anggaran pada RAPB 2010 tersebut sudah mengarah pada pencapaian target-target makro tersebut?

## Target Belum Fokus

Strategi *focus* dan *locus* kiranya menjadi jawaban paling pas untuk mencapai tujuan visi BDMD. Strategi fokus berkaitan dengan pilihan-pilihan sektor strategis yang secara integratif dan akseleratif mampu menjamin pencapaian tujuan. Sedangkan strategi *locus* berkaitan dengan pilihan-pilihan model pengembangan berkaitan dengan distribusi tempat dan klaster pengembangan.

Berkaitan dengan hal tersebut Gubernur bersama DPRD masih bisa melakukan pengajian kembali dalam berbagai hal untuk lebih menajamkan program dalam rangka pencapaian visi BDMD.

Pertama, inventarisasi dan kaji secara mendalam sektor-sektor terkait dan keterkaitan



program-program antarsektor. Tentu, saya sangat mengapresiasi cara berpikir integratif yang sudah terbangun. Pembangunan pertanian misalnya, tidak harus berarti anggaran terbesar untuk Dinas Pertanian.

Karena, untuk mengembangkan pertanian harus juga ditangani oleh dinas lain, misal PSDA atau Perbuhungan. Dasarnya adalah saat ini yang diperlukan membangun infrastruktur pertanian. Atau, mungkin yang diperlukan justru infrastruktur pemasaran karena itu untuk mendukung pengembangan pertanian justru anggaran pada dinas perdagangan yang saat ini harus ditingkatkan.

Dengan demikian, kajian ini bukan hanya pada *output* melainkan juga *outcome* dari berbagai program yang sangat mungkin bersifat lintas dinas. Dalam konteks pencapaian visi BDMD misalnya, lingkup pengajian seharusnya mencakup berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk program-program pembangunan pedesaan yang dialokasikan melalui dinas-dinas atau badan, program apa saja yang dilakukan; apakah terjadi *overlapping* atau tidak. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kedua, *need assessment* atas program perlu dipertajam. Dengan mencermati RAPBD 2010 secara lebih mendalam, kita akan mendapat kesan bahwa pemerintah belum bersungguh-sungguh memberi perhatian pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Khususnya yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani maupun pengusaha mikro dan kecil di perkotaan dan pedesaan. Alokasi anggaran APBD tersebut masih belum fokus.

#### **Peran DPRD**

Salah satu prinsip penting dalam manajemen pemerintahan modern menurut David Osborne dan Ted Gaebler adalah *result oriented government*. Prinsip ini pun telah diadopsi dan tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara no 17 tahun 2003 pasal 19. Jadi sangat jelas bahwa arah kebijakan APBD haruslah mendasarkan pada misi yang ditetapkan dan orientasinya pada *output* dan *outcome* yang akan dicapai.

Berkaitan dengan RAPBD 2010 ini, kiranya masih ada waktu bagi DPRD untuk mengaji kembali dan sekaligus mempertajam arah RAPBD tersebut agar visi BDMD bukan hanya sekadar slogan.

Ada baiknya DPRD mengaji secara mendalam dalam waktu yang sangat singkat mencakup dua aspek yang sudah disebutkan di atas: keterkaitan antarprogram antarsektor (dinas atau SKPD) dan *need assessment* atas program tersebut.

Untuk itu pula pemerintah daerah perlu menyediakan informasi alokasi anggaran yang secara mudah dapat diketahui berkaitan dengan program-program terkait dari satu SKPD dengan SKPD lainnya dan besar anggaran dari program-program tersebut. Kalaupun pada tahun ini sistem informasi alokasi anggaran ini belum bisa dilakukan, setidaknya kita berharap sistem informasi alokasi anggaran ini dilakukan untuk penyusunan RAPBD tahun 2011 mendatang. (80)